

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016-2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

DANA FALIH AHMAD

B 200 160 258

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016-2018)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DANA FALIH AHMAD

B 200 160 258

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Drs. Eko Sugiyanto, M.Si
NIK/NIDN: 538/ 0628055901

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016-2018)**

**OLEH
DANA FALIH AHMAD
B 200 160 258**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 23 Juli 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Drs. Eko Sugiyanto, M.Si**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Banu Witono, S.E., M.Si**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Mahameru Rosy Rochmatullah, SE, M.Si**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Agus Setvawan, S.E., M.Si
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Juli 2022

Penulis



DANA FALIH AHMAD
B 200 160 258

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016-2018)**

Abstrak

Otonomi daerah berpengaruh terhadap pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah kota di Jawa Tengah bertanggung jawab untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan layanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menguji pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas), uji kelayakan model (analisis regresi linear berganda), uji hipotesis (uji parsial (Uji statistik t), dan koefisien determinasi (R^2)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki t hitung sebesar 9,982 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ dan $0,1$. Dengan demikian H1 diterima oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAU memiliki t hitung sebesar 1,939 dan nilai signifikansi sebesar $0,055 > \alpha = 0,05$, akan tetapi $< \alpha = 0,1$. Dengan demikian H2 diterima oleh karena itu Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAK memiliki t hitung sebesar 1,040 dan nilai signifikansi sebesar $0,301 > \alpha = 0,05$ dan $0,1$. Dengan demikian H3 ditolak oleh karena itu Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: otonomi daerah, pemerintah daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Abstract

Regional autonomy causes regional governments to be able to manage their own regional finances transparently. Central Java has is responsible for providing and fulfilling public facilities. This study aims to analyze the influence of PAD, DAU, DAK on capital expenditure in Central Java Regency/City government in 2016-2018. This type of research was quantitative research by testing the effect of independent variables PAD, DAU, DAK on the dependent variable capital expenditure. The population included all Central Java Regency/City Governments. The sampling technique used purposive sampling method. Data analysis used quantitative data analysis methods using SPSS program as a tool to test data. Data analysis used descriptive statistic, the classic assumption test (normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test), model feasibility

test (multiple linear regression analysis), hypothesis test (parcial test (t statistic test) and determination coefficient (R^2)).

Keywords: regional autonomy, local government, general allocation fund and special allocation fund.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah di Indonesia sejatinya memberikan kewenangan dan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing (otonomi daerah). Otonomi daerah biasanya diterapkan di negara-negara yang demokratis dan berbentuk serikat dan kesatuan. Latar belakang otonomi daerah timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik (Aziz, 2016).

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi dengan demikian dapat memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah (fajriansyah et al., 2019).

Otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya terkandung tiga misi utama yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2009: 59).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara

ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk dengan demikian terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kenyataan yang terjadi pada pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal dibandingkan dengan jumlah belanja pegawai. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun jika sarana prasarana cukup memadai, tentu masyarakat akan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh semakin meningkatnya tingkat produktivitas. Demikian pula, ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai akan mendorong atau menarik para investor untuk membuka suatu usaha atau berinvestasi di daerahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal” (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018).

2. METODE

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melalui proses yang memungkinkan peneliti membangun hipotesis dan mengujinya secara empiris terhadap hipotesis yang dibangun. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas dua puluh sembilan Kabupaten dan enam Kota.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yang akan dipilih berdasarkan penilaian kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang di sesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi APBD lengkap 3 tahun (2016-2018).

2.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada data Laporan dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016-2018 Provinsi Jawa Tengah. Berupa laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan realisasi belanja modal. Data tersebut diperoleh melalui *website* www.djpk.kemenkeu.go.id.

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.3.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2014:67) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber pada: retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap akan memiliki berbagai ciri yang dapat berwujud. Belanja modal berperan dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam jangka panjang.

2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS versi 20. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk menganalisis data dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan 0,1 (10%). Metode analisis regresi linear berganda dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$BM = a + b_1 \text{ PAD} + b_2 \text{ DAU} + b_3 \text{ DAK} + e \quad (1)$$

Keterangan:

BM	= Belanja Modal
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien regresi PAD, DAU, dan DAK
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
e	= <i>Error</i>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskriptif Populasi dan Sampel

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	35
2	Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi APBD Lengkap 3 Tahun (2016-2018)	35
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat	35
	Jumlah Kabupaten/Kota selama 3 Tahun	105
	Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan (N)	105

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0.147	Data Terdistribusi Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 hasil uji normalitas, dengan menggunakan model *Central Limit Theorem* (CLT) pada metode uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov Test* diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,147 lebih besar dari 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0.630	1.588	Tidak terjadi Multikolinearitas
DAU	0.280	3.576	Tidak terjadi Multikolinearitas
DAK	0.325	3.073	Tidak terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 3 uji Multikolinearitas menggambarkan bahwa setiap variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan untuk nilai VIF kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0.142	Data Terdistribusi Normal

Berdasarkan tabel 4 uji autokorelasi menunjukkan pengujian autokorelasi menggunakan uji *Run Test* dengan nilai *Asymp. Sig. (2t-tailed)* sebesar 0,142 lebih dari 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
PAD	0.054	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
DAU	0.414	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
DAK	0.518	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 5 uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini nilai *Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Dengan hasil yang menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 oleh karena itu bahwa semua variabel independen tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

3.3 Uji Kelayakan Model

3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13156051443	43171753837		0.305	0.761
PAD	0.528	0.053	0.704	9.982	0.000
DAU	0.158	0.081	0.205	1.939	0.055
DAK	0.179	0.172	0.102	1.040	0.301

Berdasarkan pengujian regresi linear berganda pada tabel IV. 6 hasil analisis regresi linear berganda tersebut, oleh karena itu diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = 13.156.051.443 + 0,528 PAD + 0,158 DAU + 0,179 DAK + e \quad (2)$$

3.3.2 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Variabel	T	Sig.	Keterangan
PAD	9.982	0.000	Berpengaruh
DAU	1.939	0.055	Berpengaruh
DAK	1.040	0.301	Tidak berpengaruh

Uji parsial atau uji statistik t untuk mengetahui variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat tingkat signifikansi pengujian sebesar 5% atau (0,05) dan 10% (0,1) .

3.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.827 ^a	0.683	0.674	107443769167.15974

Berdasarkan tabel 8 hasil koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,674 atau 67,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar 67,4% sedangkan 32,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji parsial (uji statistik t) diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai T_{Hitung} sebesar 9,982. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah, semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan ke pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Asmani dan Ulan (2018), Dewi (2019), dan Juniawan dan Suryantini (2018). Dari hasil penelitian

didapatkan hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji parsial (uji statistik t) diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.055 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 akan tetapi lebih kecil dari 0,1 dengan nilai T_{Hitung} sebesar 1,939. Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan DAU merupakan dana transfer yang cukup signifikan dengan begitu pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini didukung Elvia Puspa Dewi (2019). Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji parsial (uji statistik t) diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,301 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai T_{Hitung} sebesar 1,040. Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Asmani dan Ulan (2018). Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian analisis, dan pembahasan, oleh karena itu kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai T_{Hitung} sebesar 9,982. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.055 lebih besar dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 akan tetapi kurang dari 0,1 dengan nilai T_{Hitung} sebesar 1,939. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,301 lebih besar dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai T_{Hitung} sebesar 1,040. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Adapun beberapa saran dari peneliti yang nantinya dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya dapat meningkatkan variabel penelitian dengan cara menambah variabel, selain variabel yang telah digunakan agar hasilnya dapat menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah.
- b. Menambah periode Laporan Realisasi APBD agar mendapatkan hasil yang berbeda dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih lengkap.
- c. Memperluas objek penelitian dengan cara menambahkan atau mengganti sampel penelitian dengan tidak menggunakan satu provinsi saja, namun bisa menggunakan dua atau lebih provinsi agar mendapatkan objek penelitian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Ni Putu Gina S dan Ida Bagus P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol. 7, No. 2: 1080-1110. ISSN: 2302-8912.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, Zeni Sri Ulan. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Universitas

- Kahuripan Kediri, Jawa Timur. *Jurnal Education and Economics*. Vol. 1, No. 4. ISSN: 2654-9808.
- Aziz, Asmaul. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. *Jurnal EKSIS*. Vol. 9, No. 1: 86-101. ISSN: 1907-7513.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2018*. Semarang: BPS Jawa Tengah. Indonesia.
- Dewi, Elvia Puspa. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. STIE International Golden Institute, Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*. Vol. 1, No. 4. ISSN: 2628-5661.
- Ernayani, Rihfenti. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas, Balikpapan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. Vol. 1, No. 1. ISSN: 2580-5398.
- Fajriansyah, dkk. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017. *Jurnal EMBA*. Vol. 7, No. 3: 4465-4474. ISSN: 2303-1174.
- Felix, Olurankinse. (2012). Analysis of the Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in the Local Government System of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4 (1). PP 1-6.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3 (4). PP 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, dkk. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pertiwi, Elisa R dan Yuliasuti R. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap alokasi Belanja Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 11.
- Rasyid, Moh. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal 69 Katalogis*. Vol. 6, No. 5: 68-80. ISSN: 2302-2019.
- Sari, Erlina Tiara I dan Nur Fadjrih A. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 5. ISSN: 2460-0585.
- Siswanto, Sunarno. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Denni. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *UNNES. EDAJI*. Vol. 1. ISSN: 2252-6560.
- Syukri, Muhammad dan Didi Haryono. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan PMA Terhadap Tingkat Kemajuan Daerah. *Jurnal Masagena*. Vol. 13, No. 2: 525-534.
- Syukri, Muhammad dan Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal. Fakultas Ekonomi, Universitas Andi Djemma. *Jurnal of Economic, Management and Accounting*. Vol. 2, No. 2. ISSN: 2615-1871.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.